



Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pembalakan Liar Hutan Lindung Di Kabupaten Soppeng

Zhaydinal Ali

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: zhaydinalali67@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against illegal logging practices in protected forests in Soppeng Regency. Illegal logging is a form of environmental crime that significantly impacts ecosystem damage, biodiversity loss, and environmental degradation. This study employed qualitative methods with a descriptive approach, using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation studies. The informants included law enforcement officers, forestry agencies, and local communities. The research results indicate that law enforcement against illegal logging in Soppeng Regency has not been optimal. This is due to several factors, including limited human resources, weak coordination between institutions, low public legal awareness, and economic factors that encourage people to engage in illegal logging. Furthermore, the legal sanctions imposed have not had a deterrent effect on perpetrators. In conclusion, the effectiveness of law enforcement against illegal logging in protected forests in Soppeng Regency still needs to be improved through strengthening inter-agency coordination, increasing the capacity of law enforcement officers, and empowering communities through educational approaches and alternative economic approaches. These efforts are expected to reduce the rate of illegal logging and maintain the sustainability of protected forests.

Keywords: law enforcement, illegal logging, protected forests, effectiveness, Soppeng Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng. Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan pembalakan liar. Selain itu, sanksi hukum yang diberikan belum menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng masih perlu ditingkatkan melalui

penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan ekonomi alternatif. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan angka pembalakan liar dan menjaga kelestarian hutan lindung secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Pembalakan Liar, Hutan Lindung, Efektivitas, Kabupaten Soppeng.*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sebagai penyedia oksigen, pengatur tata air, serta habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hutan lindung secara khusus memiliki fungsi strategis dalam melindungi sistem penyangga kehidupan. Namun, keberadaan hutan lindung saat ini menghadapi berbagai ancaman serius, salah satunya adalah praktik pembalakan liar.

Pembalakan liar merupakan aktivitas penebangan pohon tanpa izin yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, erosi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Soppeng, pembalakan liar masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dan sulit untuk diberantas.

Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi kawasan hutan serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembalakan liar. Selain itu, aparat penegak hukum juga telah melakukan berbagai upaya penindakan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pembalakan liar masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya kemungkinan keterlibatan oknum tertentu.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan dalam menanggulangi pembalakan liar, khususnya di kawasan hutan lindung di Kabupaten Soppeng. Apakah upaya yang dilakukan telah mampu memberikan efek jera kepada pelaku dan menekan angka kerusakan hutan, atau justru masih belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung Kabupaten Soppeng, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan strategi penegakan hukum di bidang kehutanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng, serta mengungkap berbagai faktor yang

memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Soppeng, dengan fokus pada kawasan hutan lindung yang rawan terjadi aktivitas pembalakan liar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar serta menghadapi permasalahan penegakan hukum yang kompleks. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap relevan, seperti aparat penegak hukum (kepolisian, kehutanan), pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar hutan. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan hutan dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi terkait, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel dan mendalam. Observasi dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan kebijakan dan kasus pembalakan liar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul dari data tersebut. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pembalakan Liar Hutan Lindung di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa praktik pembalakan liar masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dari instansi terkait, ditemukan bahwa tingkat pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung masih tergolong tinggi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa aparat penegak hukum telah melakukan berbagai tindakan, seperti patroli rutin, operasi gabungan, serta penindakan terhadap pelaku pembalakan liar. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya aktivitas ilegal yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi di beberapa titik kawasan hutan lindung.

Salah satu faktor yang memengaruhi kurang optimalnya penegakan hukum adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana pendukung. Luasnya wilayah hutan yang harus diawasi tidak

sebanding dengan jumlah petugas yang tersedia, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, akses menuju lokasi hutan yang sulit juga menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sebagian masyarakat masih melakukan pembalakan liar karena faktor ekonomi, seperti kebutuhan hidup sehari-hari dan kurangnya alternatif mata pencaharian. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan pendekatan sosial dan ekonomi.

Dalam aspek penindakan, proses hukum terhadap pelaku pembalakan liar sebenarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, efek jera yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kasus di mana sanksi yang diberikan dianggap belum cukup tegas, serta masih adanya kemungkinan praktik-praktik yang melemahkan proses penegakan hukum, seperti kurangnya pengawasan lanjutan.

Di sisi lain, terdapat pula upaya-upaya positif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendekatan preventif juga sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung Kabupaten Soppeng masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum belum sepenuhnya efektif karena dipengaruhi oleh faktor internal (keterbatasan aparat dan fasilitas) serta faktor eksternal (kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rendahnya kesadaran lingkungan).

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, edukasi lingkungan, serta penguatan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, diharapkan upaya perlindungan hutan lindung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di hutan lindung di Kabupaten Soppeng masih belum optimal. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan upaya dari aparat penegak hukum, implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, serta luasnya wilayah hutan yang harus diawasi menjadi hambatan utama dalam proses pengawasan dan penindakan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian hutan serta adanya tekanan ekonomi turut mendorong terjadinya praktik pembalakan liar. Penegakan hukum yang belum konsisten dan kurang memberikan efek jera juga menyebabkan pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, koordinasi

antarinstansi terkait masih perlu ditingkatkan agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Kabupaten Soppeng memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari segi regulasi, penegakan sanksi, peningkatan kapasitas aparat, maupun pemberdayaan masyarakat. Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hutan lindung yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Kehutanan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Faisal, A. (2021). Efektivitas penegakan hukum terhadap illegal logging di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(2), 120-135.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020*. Jakarta: KLHK.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, R. (2022). Analisis pembalakan liar di kawasan hutan lindung. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 45-60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan